



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 78 TAHUN 2023
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di

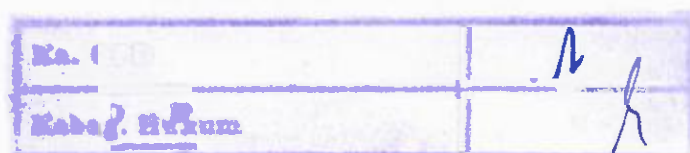
Ka. OPD BPKAD	A
Kabag. Hukum	K

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

Ka. OPD	
Kabag. Hukum	

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan



- Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor 4 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor 2 Seri A);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor 3 Seri A);
27. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor Nomor 13 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.



Pasal 2

Anggaran Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp998.444.140.341,00 (*Sembilan ratus Sembilan puluh delapan miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah*) bertambah sebesar Rp108.293.794.841,00 (*seratus delapan miliar dua ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah*) dari semula sebesar Rp890.150.345.500,00 (*delapan ratus Sembilan puluh miliar seratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp73.406.243.465,00 (*tujuh puluh tiga miliar empat ratus enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp3.140.315.965,00 (*tiga miliar seratus empat puluh juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*) dari semula sebesar Rp70.265.927.500,00 (*tujuh puluh miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
- b. Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp913.912.896.877,00 (*Sembilan ratus tiga belas miliar Sembilan ratus dua belas juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) bertambah sebesar Rp105.528.478.877,00 (*seratus lima miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) dari semula Rp808.384.418.000,00 (*delapan ratus delapan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah*); dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp11.125.000.000,00 (*sebelas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah*); berkurang sebesar Rp375.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*); dari semula sebesar Rp11.500.000.000,00 (*sebelas miliar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 3

Anggaran Perubahan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp73.406.243.465,00 (*tujuh puluh tiga miliar empat ratus enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*)

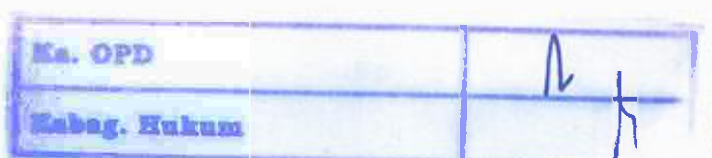


bertambah sebesar Rp3.140.315.965,00 (*tiga miliar seratus empat puluh juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*) dari semula sebesar Rp70.265.927.500,00 (*tujuh puluh miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp29.156.787.500,00 (*dua puluh sembilan miliar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
- b. Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp8.127.500.000,00 (*delapan miliar seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp418.360.000,00 (*empat ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) dari semula Rp7.709.140.000,00 (*tujuh miliar tujuh ratus sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah*);
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp9.850.000.000,00 (*sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) atau bertambah sebesar Rp5.950.000.000,00 (*lima miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) dari semula Rp3.900.000.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus juta rupiah*);
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp26.271.955.965,00 (*dua puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*) berkurang sebesar Rp3.228.044.035,00 (*tiga miliar dua ratus dua puluh delapan juta empat puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah*) dari Rp29.500.000.000,00 (*dua puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 4

- (1) Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp8.127.500.000,00 (*delapan miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp418.360.000,00 (*empat ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) dari semula Rp7.709.140.000,00 (*tujuh miliar tujuh ratus sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.293.360.000,00 (*lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp1.068.360.000,00 (*satu miliar*



enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari semula sebesar Rp4.225.000.000,00 (*empat miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah*).

- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.547.140.000,00 (*duamiliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp620.000.000,00 (*enam ratus dua puluh juta rupiah*) dari semula sebesar Rp3.167.140.000,00 (*tiga miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp287.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah*) berkurang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dari semula sebesar Rp317.000.000,00 (*tiga ratus tujuh belas juta rupiah*).

Pasal 5

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp9.850.000.000,00 (*sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) atau bertambah sebesar Rp5.950.000.000,00 (*lima miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) dari semula Rp3.900.000.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus juta rupiah*) yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 6

- (1) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d direncanakan sebesar Rp26.271.955.965,00 (*dua puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*) berkurang sebesar Rp3.228.044.036 (*tiga miliar dua ratus dua puluh delapan juta empat puluh empat ribu tiga puluh enam rupiah*) dari semula sebesar Rp29.500.000.000,00 (*dua puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas :
- Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
 - Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - Jasa Giro;
 - Pendapatan Bunga;
 - Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;



- f. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - g. Pendapatan Dari Pengembalian;
 - h. Pendapatan BLUD; dan
 - i. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) bertambah sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dari semula sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
 - (3) Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp99.000.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta rupiah*);
 - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*);
 - (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) berkurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dari semula sebesar Rp3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*);
 - (6) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
 - (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp640.000.000,00 (*enam ratus empat puluh juta rupiah*) bertambah sebesar Rp390.000.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh juta rupiah*) dari semula sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
 - (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
 - (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp16.057.034.381,26 (*enam belas miliar lima puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu dan dua puluh enam perseratus rupiah*) berkurang sebesar Rp6.442.965.618,74 (*enam miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan belas dan tujuh puluh empat perseratus rupiah*) dari semula sebesar Rp22.500.000.000,00 (*dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah*); dan
 - (10) Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.525.921.583,47 (*tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga dan empat puluh tujuh perseratus rupiah*) bertambah sebesar



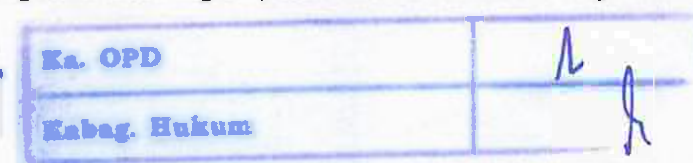
Rp3.275.921.583,47 (*tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga dan empat puluh tujuh perseratus rupiah*) dari semula Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Perubahan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp913.912.896.877,00 (*Sembilan ratus tiga belas miliar Sembilan ratus dua belas juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) bertambah sebesar Rp105.528.478.877,00 (*seratus lima miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) dari semula Rp808.384.418.000,00 (*delapan ratus delapan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp809.012.386.072,00 (*delapan ratus Sembilan miliar dua belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah*) atau bertambah sebesar Rp42.627.968.072,00 (*empat puluh dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah*) dari semula sebesar Rp766.384.418.000,00 (*tujuh ratus enam puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.900.510.805,00 (*seratus empat miliar Sembilan ratus juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus lima rupiah*) atau bertambah sebesar Rp62.900.510.805,00 (*enam puluh dua miliar Sembilan ratus juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus lima rupiah*) dari semula Rp42.000.000.000,00 (*empat puluh dua miliar rupiah*).

Pasal 8

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 2 direncanakan sebesar Rp809.012.386.072,00 (*delapan ratus Sembilan miliar dua belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah*) atau bertambah sebesar Rp42.627.968.072,00 (*empat puluh dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah*) dari semula sebesar Rp766.384.418.000,00



(tujuh ratus enam puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Dana Perimbangan;
- b. Dana Insentif Daerah; dan
- c. Dana Desa.

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp727.620.697.072,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp34.976.002.072,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ribu tujuh puluh dua rupiah) dari semula sebesar Rp692.644.695.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.956.967.000,00 (dua puluh enam miliar Sembilan ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.836.620.000,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dari semula sebesar Rp21.120.347.000,00 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar sebesar Rp54.434.722.000,00 (lima puluh empat miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.815.346.000,00 (satu miliar delapan ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari semula sebesar Rp52.619.376.000,00 (lima puluh dua miliar enam ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 3 direncanakan sebesar Rp104.900.510.805,00 (seratus empat miliar Sembilan ratus juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus lima rupiah) atau bertambah sebesar Rp62.900.510.805,00 (enam puluh dua miliar sembilan ratus juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus lima rupiah) dari semula Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil;
 - b. Bantuan Keuangan; dan
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.052.810.805,00 (enam puluh sembilan miliar lima puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus lima rupiah) bertambah sebesar Rp27.052.810.805,00 (dua puluh tujuh miliar lima puluh dua juta delapan ratus



sepuluh ribu delapan ratus lima rupiah) dari semula Rp42.000.000.000,00 (*empat puluh dua miliar rupiah*).

- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.847.700.000,00 (*tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp11.125.000.000,00 (*sebelas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah*) berkurang sebesar Rp375.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dari semula sebesar Rp11.500.000.000,00 (*sebelas miliar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Hibah
- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tidak mengalami perubahan.

- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.625.000.000,00 (*sepuluh miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah*) berkurang sebesar Rp375.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dari semula sebesar Rp11.000.000.000,00 (*sebelas miliar rupiah*).

Pasal 11

Anggaran perubahan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.105.735.942.112,00 (*satu triliun seratus lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus dua belas rupiah*) bertambah sebesar Rp83.579.090.180,00 (*delapan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan puluh ribu seratus delapan puluh rupiah*) dari semula sebesar Rp1.022.156.851.932,00 (*satu triliun dua puluh dua miliar seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*) yang terdiri atas:

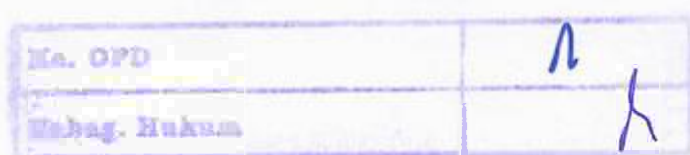
- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal



- c. Belanja Tidak Terduga
- d. Belanja Transfer

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp802.642.439.800,00 (*delapan ratus dua miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp57.353.691.927,00 (*lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilann puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah*) dari semula sebesar Rp745.288.747.873,00 (*tujuh ratus empat puluh lima miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp369.311.434.911,00 (*tiga ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus sebelas rupiah*) berkurang sebesar Rp7.747.189.633,00 (*tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*) dari semula sebesar Rp377.058.624.544,00 (*tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp383.770.121.520,00 (*tiga ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp50.634.161.669,00 (*lima puluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah*) dari semula sebesar Rp333.135.959.851,00 (*tiga ratus tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.583.453.369,00 (*empat puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp14.861.131.891,00 (*empat belas miliar delapan ratus enam puluh satu*

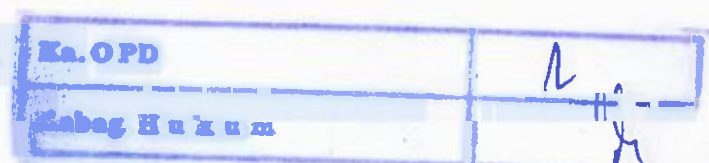


juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) dari semula sebesar Rp30.722.321.478,00 (*tiga puluh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah*).

- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.977.430.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp394.412.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp4.371.842.000,00 (*empat miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah*).

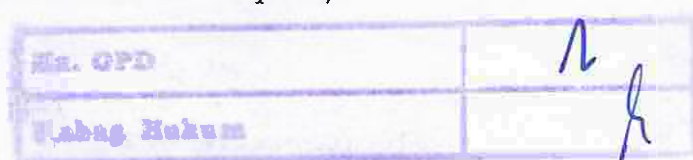
Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp369.311.434.911,00 (*tiga ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus sebelas rupiah*) berkurang sebesar Rp7.747.189.633,00 (*tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*) dari semula sebesar Rp377.058.624.544,00 (*tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah*) yang terdiri atas :
- Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH; dan
 - Belanja Pegawai BOS.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp199.051.599.417,00 (*seratus Sembilan puluh Sembilan miliar lima puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh belas rupiah*) bertambah sebesar Rp904.064.037,00 (*Sembilan ratus empat juta enam puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah*) dari semula sebesar Rp198.147.535.380,00 (*seratus sembilan puluh delapan miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp111.039.405.175,00 (*seratus sebelas miliar tiga puluh*



Sembilan juta empat ratus lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp9.179.789.920,00 (*sembilan miliar seratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah)* dari semula sebesar Rp120.219.195.095,00 (*seratus dua puluh miliar dua ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh lima rupiah).*

- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.499.804.532,00 (*tiga puluh delapan miliar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus empat ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah)* berkurang sebesar Rp230.995.333,00 (*dua ratus tiga puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)* dari semula sebesar Rp38.730.799.865,00 (*tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).*
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 13.798.400.000,00 (*tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)* bertambah sebesar Rp 400,00 (*empat ratus rupiah)* dari semula sebesar Rp 13.798.399.600,00 (*tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).*
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp603.585.787,00 (*enam ratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah)* bertambah sebesar Rp33.064.917,00 (*tiga puluh tiga juta enam puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah)* dari semula sebesar Rp636.650.704,00 (*enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat rupiah).*
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp601.600.000,00 (*enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah)* berkurang sebesar Rp400,00 (*empat ratus rupiah)* dari semula sebesar Rp601.600.400,00 (*enam ratus satu juta enam ratus ribu empat ratus rupiah).*
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.717.040.000,00 (*lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat puluh ribu rupiah)* bertambah sebesar Rp792.596.500,00 (*tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)* dari semula sebesar Rp4.924.443.500,00 (*empat miliar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).*



Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) direncanakan sebesar Rp383.770.121.520,00 (*tiga ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp50.634.161.669,00 (*lima puluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah*) dari semula sebesar Rp333.135.959.851,00 (*tiga ratus tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah*) yang terdiri atas:
- Belanja Barang;
 - Belanja Jasa;
 - Belanja Pemeliharaan;
 - Belanja Perjalanan Dinas;
 - Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain/ Masyarakat;
 - Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.788.115.147,00 (*enam puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus lima belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah*) bertambah sebesar Rp10.101.959.111,00 (*sepuluh miliar seratus satu juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu seratus sebelas rupiah*) dari semula sebesar Rp51.686.156.036,00 (*lima puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp196.322.032.808,00 (*seratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp15.420.654.714,00 (*lima belas miliar empat ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah*) dari semula sebesar Rp180.901.378.094,00 (*seratus delapan puluh miliar sembilan ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.915.083.922,00 (*enam belas miliar sembilan ratus lima belas juta delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah*)



bertambah sebesar Rp5.423.882.495,00 (*lima miliar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah*) dari semula sebesar Rp11.491.201.427,00 (*sebelas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah*).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.552.025.894,00 (*lima puluh tiga miliar lima ratus lima puluh dua juta dua puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp6.397.508.112,00 (*enam miliar lima tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu seratus dua belas rupiah*) dari semula sebesar Rp47.154.517.782,00 (*empat puluh tujuh miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.104.676.266,00 (*tiga belas miliar seratus empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp6.073.990.965,00 (*enam miliar tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah*) dari semula sebesar Rp7.030.685.301,00 (*tujuh miliar tiga puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus satu rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.473.385.833,00 (*delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah*) berkurang sebesar Rp1.204.690.378,00 (*satu miliar dua ratus empat juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*) dari semula sebesar Rp19.678.076.211,00 (*sembilan belas miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.614.801.000,00 (*dua puluh tiga miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus satu ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp8.420.856.650,00 (*delapan miliar empat ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah*) dari semula sebesar Rp15.193.945.000,00 (*lima belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

No. OPD	
Kabag. Hukum	

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) direncanakan sebesar Rp45.583.453.369,00 (*empat puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp14.861.131.891,00 (*empat belas miliar delapan ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah*) dari semula sebesar Rp30.722.321.478,00 (*tiga puluh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah Kepada Kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Kepada Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp642.964.000,00 (*enam ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah*) dari semula belum teranggarkan;
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.358.074.000,00 (*tujuh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah*) dari semula belum teranggarkan;
- (4) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.854.987.028,00 (*tiga puluh dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp6.009.711.200,00 (*enam miliar Sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus rupiah*) dari semula sebesar Rp26.845.275.828,00 (*dua puluh enam miliar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.282.643.341,00 (*tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah*) bertambah sebesar Rp850.382.691,00 (*delapan ratus lima puluh juta tiga ratus*



delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) dari semula sebesar Rp 2.432.260.650,00 (*dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah*).

- (6) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.444.785.000,00 (*satu miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) dan tidak mengalami perubahan.

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan sebesar Rp3.977.430.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp394.412.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp4.371.842.000,00 (*empat miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah*) yang terdiri atas:
- Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;
 - Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga; dan
 - Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.777.230.000,00 (*tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp298.162.000,00 (*dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp 4.075.392.000,00 (*empat miliar tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.200.000,00 (*dua ratus juta dua ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp00,00 dari semula sebesar Rp96.250.000,00 (*sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).



Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp182.196.360.162,00 (*seratus delapan puluh dua miliar seratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp21.649.624.253,00 (*dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah*) dari semula sebesar Rp160.546.735.909,00 (*seratus enam puluh miliar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja modal atas tanah yang direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (*dua miliar tujuh ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.368.447.316,00 (*tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas rupiah*) bertambah sebesar Rp6.096.632.277,00 (*enam miliar Sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) dari semula sebesar Rp27.271.815.039,00 (*dua puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu tiga puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 68.572.341.000,00 (*enam puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp15.827.661.000,00 (*lima belas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp52.744.680.000,00 (*lima puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp73.018.630.372,00 (*tujuh puluh tiga miliar delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*)



berkurang sebesar Rp3.053.859.998,00 (*tiga miliar lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah*) dari semula sebesar Rp76.072.490.370,00 (*tujuh puluh enam miliar tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*).

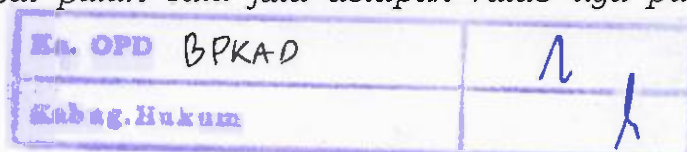
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.536.941.474,00 (*empat miliar lima ratus tigapuluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp2.809.190.974,00 (*dua miliar delapan ratus sembilan juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*) dari semula sebesar Rp1.727.750.500,00 (*satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dihapus dari semula sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).

Pasal 18

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp3.250.000.000,00 (*tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) berkurang sebesar Rp855.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh lima juta rupiah*) dari semula sebesar Rp4.105.000.000,00 (*empat miliar seratus lima juta rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp117.647.142.150,00 (*seratus tujuh belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp5.430.774.000,00 (*lima miliar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp112.216.368.150,00 (*seratus dua belas miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.728.428.750,00 (*tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp41.836.000,00 (*empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu*



rupiah) dari semula sebesar Rp3.686.592.750,00 (*tiga miliar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp113.918.713.400,00 (*seratus tiga belas miliar Sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp5.388.938.000,00 (*lima miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp108.529.775.400,00 (*seratus delapan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 20

Anggaran Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp107.291.801.771,00 (*seratus tujuh miliar dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*) berkurang sebesar Rp24.714.704.661,00 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah*) dari semula sebesar Rp132.006.506.432,00 (*seratus tiga puluh dua miliar enam juta lima ratus enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

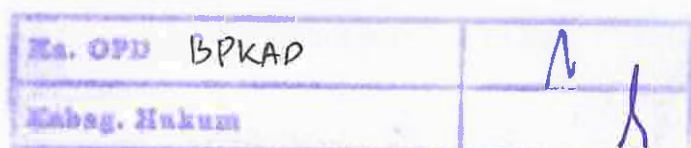
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 21

- (1) Anggaran perubahan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp107.291.801.771,00 (*seratus tujuh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*) berkurang sebesar Rp24.714.704.661,00 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah*) dari semula sebesar Rp132.006.506.432,00 (*seratus tiga puluh dua miliar enam juta lima ratus enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
- b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp107.191.801.771,00



(seratus tujuh miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp24.714.704.661,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) dari semula sebesar Rp131.906.506.432,00 (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus enam juta lima ratus enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

- (3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 22

Anggaran perubahan Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b yang semula direncanakan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp00,00 (*nol rupiah*).

Pasal 23

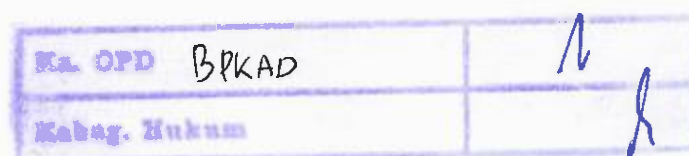
- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp107.291.801.771,00 (*seratus tujuh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*) berkurang sebesar Rp24.714.704.661,00 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah*) dari semula sebesar Rp132.006.506.432,00 (*seratus tiga puluh dua miliar enam juta lima ratus enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp107.291.801.771,00 (*seratus tujuh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*) berkurang sebesar Rp24.714.704.661,00 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah*) dari semula sebesar Rp132.006.506.432,00 (*seratus tiga puluh dua miliar enam juta lima ratus enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*).

Pasal 24

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

No. OPD	BPKAD
Kabag. Hukum	

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis, Rincian Objek, sub rincian objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;



Pasal 25

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 10 Oktober 2023

BUPATI BANGKA BARAT,

H.SUKIRMAN af Koordinasi

Sekretaris Daerah

Asisten

Ka. OPD BPKAD

Kabag. Hukum

Sekretaris OPD

Kabid.

Sub Koor Pnu

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 10 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 9 SERI A

Lampiran I : Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 78 Tahun 2023
 Tanggal : 10 Oktober 2023

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENU RUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70.265.927.500	73.406.243.465	3.140.315.965	4 %
4.1.01	Pajak Daerah	29.156.787.500	29.156.787.500	0	0 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	105.787.500	105.787.500	0	0 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	105.787.500	105.787.500	0	0 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	105.787.500	105.787.500	0	0 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.961.000.000	2.961.000.000	0	0 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0	2.961.000.000	2.961.000.000	100 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0	2.961.000.000	2.961.000.000	100 %
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.961.000.000	0	(2.961.000.000)	100 %
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.961.000.000	0	(2.961.000.000)	100 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	70.000.000	70.000.000	0	0 %
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0	70.000.000	70.000.000	100 %
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0	70.000.000	70.000.000	100 %
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	70.000.000	0	(70.000.000)	100 %
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	70.000.000	0	(70.000.000)	100 %
4.1.01.09	Pajak Reklame	500.000.000	500.000.000	0	0 %
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	500.000.000	500.000.000	0	0 %
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	500.000.000	500.000.000	0	0 %
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0 %
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0 %
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0 %
4.1.01.11	Pajak Parkir	20.000.000	20.000.000	0	0 %
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	20.000.000	20.000.000	0	0 %
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	20.000.000	20.000.000	0	0 %
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	250.000.000	250.000.000	0	0 %

Ka. OPD Bptad
 Kabag. Hukum

Lampiran I : Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 78 Tahun 2023
 Tanggal : 10Oktober 2023

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	250.000.000	250.000.000	0	0 %
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	250.000.000	250.000.000	0	0 %
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	800.000.000	800.000.000	0	0 %
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	800.000.000	800.000.000	0	0 %
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	800.000.000	800.000.000	0	0 %
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.300.000.000	6.300.000.000	0	0 %
4.1.01.15.01	PBBP2	6.300.000.000	6.300.000.000	0	0 %
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	6.300.000.000	6.300.000.000	0	0 %
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.650.000.000	1.650.000.000	0	0 %
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	0	650.000.000	650.000.000	100 %
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	0	650.000.000	650.000.000	100 %
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.650.000.000	1.000.000.000	(650.000.000)	39 %
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.650.000.000	1.000.000.000	(650.000.000)	39 %
4.1.02	Retribusi Daerah	7.709.140.000	8.127.500.000	418.360.000	5 %
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4.225.000.000	5.293.360.000	1.068.360.000	25 %
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.000.000.000	2.942.360.000	942.360.000	47 %
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.000.000.000	2.942.360.000	942.360.000	47 %
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.200.000.000	1.206.000.000	6.000.000	1 %
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.200.000.000	1.206.000.000	6.000.000	1 %
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120.000.000	120.000.000	0	0 %
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120.000.000	120.000.000	0	0 %
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	50.000.000	70.000.000	20.000.000	40 %
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	50.000.000	70.000.000	20.000.000	40 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 78 Tahun 2023
Tanggal : 10 Oktober 2023

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000	100.000.000	(100.000.000)	50 %
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000	100.000.000	(100.000.000)	50 %
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	125.000.000	125.000.000	0	0 %
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	125.000.000	125.000.000	0	0 %
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	30.000.000	230.000.000	200.000.000	667 %
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	30.000.000	230.000.000	200.000.000	667 %
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000	500.000.000	0	0 %
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000	500.000.000	0	0 %
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.167.140.000	2.547.140.000	(620.000.000)	20 %
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	325.000.000	325.000.000	0	0 %
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	225.000.000	225.000.000	0	0 %
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	267.140.000	167.140.000	(100.000.000)	37 %
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	150.000.000	50.000.000	(100.000.000)	67 %
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	117.140.000	117.140.000	0	0 %
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.900.000.000	1.200.000.000	(700.000.000)	37 %
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.900.000.000	1.200.000.000	(700.000.000)	37 %
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)	50 %
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)	50 %
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	350.000.000	580.000.000	230.000.000	66 %
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	350.000.000	580.000.000	230.000.000	66 %
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	25.000.000	25.000.000	0	0 %

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	25.000.000	25.000.000	0	0 %
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	317.000.000	287.000.000	(30.000.000)	9 %
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	250.000.000	250.000.000	0	0 %
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	250.000.000	250.000.000	0	0 %
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.000.000	2.000.000	0	0 %
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.000.000	2.000.000	0	0 %
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	5.000.000	5.000.000	0	0 %
4.1.02.03.04.0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	5.000.000	5.000.000	0	0 %
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (MTA)	60.000.000	30.000.000	(30.000.000)	50 %
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	60.000.000	30.000.000	(30.000.000)	50 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.900.000.000	9.850.000.000	5.950.000.000	153 %
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.900.000.000	9.850.000.000	5.950.000.000	153 %
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.900.000.000	9.850.000.000	5.950.000.000	153 %
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.900.000.000	9.850.000.000	5.950.000.000	153 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	29.500.000.000	26.271.955.965	(3.228.044.035)	11 %
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	250.000.000	700.000.000	450.000.000	180 %
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	250.000.000	700.000.000	450.000.000	180 %
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	250.000.000	700.000.000	450.000.000	180 %
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	99.000.000	99.000.000	100 %
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0	99.000.000	99.000.000	100 %
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0	99.000.000	99.000.000	100 %
4.1.04.05	Jasa Giro	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	3.500.000.000	2.500.000.000	(1.000.000.000)	29 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 78 Tahun 2023
 Tanggal : 10 Oktober 2023

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.500.000.000	2.500.000.000	(1.000.000.000)	29 %
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.500.000.000	2.500.000.000	(1.000.000.000)	29 %
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	250.000.000	640.000.000	390.000.000	156 %
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	4.500.000	100.000.000	95.500.000	2.122 %
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	4.000.000	99.500.000	95.500.000	2.388 %
4.1.04.12.06.0005	Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata	500.000	500.000	0	0 %
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	66.000.000	200.000.000	134.000.000	203 %
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	38.500.000	172.500.000	134.000.000	348 %
4.1.04.12.07.0007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	27.500.000	27.500.000	0	0 %
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	35.000.000	35.000.000	0	0 %
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	35.000.000	35.000.000	0	0 %
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	45.000.000	50.000.000	5.000.000	11 %
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	45.000.000	50.000.000	5.000.000	11 %
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	97.000.000	250.000.000	153.000.000	158 %
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	97.000.000	250.000.000	153.000.000	158 %
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000	5.000.000	2.500.000	100 %
4.1.04.12.14.0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil	2.500.000	5.000.000	2.500.000	100 %
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	250.000.000	250.000.000	0	0 %
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	250.000.000	250.000.000	0	0 %
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	250.000.000	250.000.000	0	0 %
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	22.500.000.000	16.057.034.381	(6.442.965.619)	29 %
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	22.500.000.000	16.057.034.381	(6.442.965.619)	29 %
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	22.500.000.000	16.057.034.381	(6.442.965.619)	29 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 78 Tahun 2023
 Tanggal : 10 Oktober 2023

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	250.000.000	3.525.921.583	3.275.921.583	1.310 %
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	250.000.000	3.525.921.583	3.275.921.583	1.310 %
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	250.000.000	3.525.921.583	3.275.921.583	1.310 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	808.384.418.000	913.912.896.877	105.528.478.877	13 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	766.384.418.000	809.012.386.072	42.627.968.072	6 %
4.2.01.01	Dana Perimbangan	692.644.695.000	727.620.697.072	34.976.002.072	5 %
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	103.917.963.000	139.653.883.000	35.735.920.000	34 %
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	24.827.792.000	28.827.792.000	4.000.000.000	16 %
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	7.013.065.000	8.748.985.000	1.735.920.000	25 %
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1.005.219.000	1.005.219.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	68.288.121.000	87.989.711.000	19.701.590.000	29 %
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0	10.298.410.000	10.298.410.000	100 %
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	10.693.000	10.693.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.773.073.000	2.773.073.000	0	0 %
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	435.286.031.000	435.286.031.000	0	0 %
4.2.01.01.02.0001	DAU	411.074.717.000	411.074.717.000	0	0 %
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0 %
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	23.011.314.000	23.011.314.000	0	0 %
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	53.585.059.000	53.585.059.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	461.761.000	461.761.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.182.856.000	5.182.856.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.126.979.000	6.126.979.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	500.000.000	500.000.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	9.953.902.000	9.953.902.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	2.305.971.000	2.305.971.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	10.408.507.000	10.408.507.000	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 78 Tahun 2023
 Tanggal : 10 Oktober 2023

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.864.933.000	1.864.933.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	244.925.000	244.925.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	16.535.225.000	16.535.225.000	0	0 %
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	99.855.642.000	99.095.724.072	(759.917.928)	1 %
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	32.171.940.000	32.209.522.072	37.582.072	0 %
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.775.000.000	1.067.500.000	(707.500.000)	40 %
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	35.245.211.000	35.245.211.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	871.500.000	871.500.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.057.620.000	4.057.620.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	977.700.000	887.700.000	(90.000.000)	9 %
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.972.037.000	6.972.037.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	338.918.000	338.918.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	8.086.276.000	8.086.276.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.730.187.000	2.730.187.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	420.370.000	420.370.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.289.508.000	1.289.508.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	386.000.000	386.000.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000	438.800.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	594.575.000	594.575.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	3.500.000.000	3.500.000.000	0	0 %
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	21.120.347.000	26.956.967.000	5.836.620.000	28 %
4.2.01.02.01	DID	21.120.347.000	26.956.967.000	5.836.620.000	28 %
4.2.01.02.01.0001	DID	21.120.347.000	26.956.967.000	5.836.620.000	28 %
4.2.01.05	Dana Desa	52.619.376.000	54.434.722.000	1.815.346.000	3 %
4.2.01.05.01	Dana Desa	52.619.376.000	54.434.722.000	1.815.346.000	3 %
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	52.619.376.000	54.434.722.000	1.815.346.000	3 %

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.000.000.000	104.900.510.805	62.900.510.805	150 %
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	42.000.000.000	69.052.810.805	27.052.810.805	64 %
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	42.000.000.000	69.052.810.805	27.052.810.805	64 %
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.100.000.000	18.857.889.503	7.757.889.503	70%
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.400.000.000	21.140.912.000	6.740.912.000	47%
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	300.000.000	442.289.911	142.289.911	47 %
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.200.000.000	28.611.719.391	12.411.719.391	77 %
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0	35.847.700.000	35.847.700.000	100 %
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0	35.847.700.000	35.847.700.000	100%
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0	35.847.700.000	35.847.700.000	100 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.500.000.000	11.125.000.000	(375.000.000)	3 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	500.000.000	500.000.000	0	0%
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	500.000.000	500.000.000	0	0%
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	500.000.000	500.000.000	0	0 %
4.3.01.01.010001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	500.000.000	500.000.000	0	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.000.000.000	10.625.000.000	(375.000.000)	3 %
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.000.000.000	10.625.000.000	(375.000.000)	3 %
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.000.000.000	10.625.000.000	(375.000.000)	3 %
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.000.000.000	10.625.000.000	(375.000.000)	3 %
	Jumlah Pendapatan	890.150.345.500	998.444.140.341	108.293.794.841	12 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	745.288.747.873	802.642.439.800	57.353.691.927	8 %
5.1.01	Belanja Pegawai	377.058.624.544	369.311.434.911	(7.747.189.633)	2 %
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	198.147.535.380	199.051.599.417	904.064.037	0 %
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	138.638.354.620	141.315.155.411	2.676.800.791	2 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 78 Tahun 2023
Tanggal : 10 Oktober 2023

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	137.421.737.388	135.548.081.401	(1.873.655.987)	1 %
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.216.617.232	5.767.074.010	4.550.456.778	374 %
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	14.198.966.623	13.676.637.276	(522.329.347)	4 %
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14.024.966.623	13.072.670.049	(952.296.574)	7 %
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	174.000.000	603.967.227	429.967.227	247 %
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.690.707.000	5.046.094.375	(644.612.625)	11 %
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.690.707.000	5.001.497.575	(689.209.425)	12 %
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0	44.596.800	44.596.800	100 %
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.012.334.850	10.312.696.320	(699.638.530)	6 %
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.841.762.050	9.600.952.320	(1.240.809.730)	11 %
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	170.572.800	711.744.000	541.171.200	317 %
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.365.489.100	1.815.064.125	(550.424.975)	23 %
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.360.489.100	1.581.212.325	(779.276.775)	33 %
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.000.000	233.851.800	228.851.800	4.577 %
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	9403.955.934	8.722.381.701	(681.574.233)	7 %
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.293.555.934	8.281.289.637	(1.012.266.297)	11 %
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	110.400.000	441.092.064	330.692.064	300 %
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	383.194.133	230.625.088	(152.569.045)	40 %
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	381.694.133	151.728.347	(229.965.786)	60 %
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.500.000	78.896.741	77.396.741	5.160 %
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.475.414	37.356.718	31.881.304	582 %
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.216.414	9.035.058	3.818.644	73 %
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	259.000	28.321.660	28.062.660	10.835 %
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.510.557.785	13.928.954.825	3.418.397.040	33 %
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.425.499.785	13.599.270.923	3.173.771.138	30 %
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	85.058.000	329.683.902	244.625.902	288 %

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	484.239.545	329.893.055	(154.346.490)	32 %
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	467.139.545	296.078.719	(171.060.826)	37 %
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	17.100.000	33.814.336	16.714.336	98 %
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.156.185.139	874.341.663	(281.843.476)	24 %
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.141.885.139	817.802.405	(324.082.734)	28 %
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	14.300.000	56.539.258	42.239.258	295 %
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.298.075.237	2.762.398.860	(1.535.676.377)	36 %
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	4.197.968.759	2.212.753.360	(1.985.215.399)	47 %
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	100.106.478	549.645.500	449.539.022	449 %
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	120.219.195.095	111.039.405.175	(9.179.789.920)	8 %
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	36.311.702.670	34.006.905.050	(2.304.797.620)	6 %
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	35.963.968.670	31.925.597.252	(4.038.371.418)	11 %
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	347.734.000	2.081.307.798	1.733.573.798	499 %
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	21.783.656.225	21.674.254.625	(109.401.600)	1 %
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	21.409.024.225	20.842.945.625	(566.078.600)	3 %
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	374.632.000	831.309.000	456.677.000	122 %
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	6.730.530.000	6.602.126.400	(128.403.600)	2 %
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	6.730.530.000	6.602.126.400	(128.403.600)	2 %
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	55.393.306.200	48.756.119.100	(6.637.187.100)	12 %
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	54.896.756.200	47.406.363.100	(7.490.393.100)	14 %
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	496.550.000	1.349.756.000	853.206.000	172 %
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	38.730.799.865	38.499.804.532	(230.995.333)	1 %
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	967.753.625	760.264.125	(207.489.500)	21 %
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	3.173.625	3.173.625	0	0 %
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	88.830.000	88.830.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	2.100.000	2.100.000	0	0 %

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	15.000.000	15.000.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	540.000.000	450.000.000	(90.000.000)	17 %
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	600.000	600.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	7.875.000	7.500.000	(375.000)	5 %
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	26.000.000	24.000.000	(2.000.000)	8 %
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	157.500.000	45.000.000	(112.500.000)	71 %
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	77.175.000	74.560.500	(2.614.500)	3 %
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	49.500.000	49.500.000	0	0 %
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	195.695.240	248.914.407	53.219.167	27 %
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	66.000.000	98.078.667	32.078.667	49 %
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.560.000	41.838.000	27.278.000	187 %
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.420.000	3.420.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1.781.250	3.275.000	1.493.750	84 %
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	5.700.000	2.850.000	(2.850.000)	50 %
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.375.000	7.532.500	5.157.500	217 %
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000	5.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	7.037.500	10.238.750	3.201.250	45 %
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	2.000.000	4.000.000	2.000.000	100 %
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	7.613.490	4.763.490	(2.850.000)	37 %
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	54.150.000	34.200.000	(19.950.000)	37 %
5.1.01.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	4.100.000	2.050.000	(2.050.000)	50 %
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	14.350.000	23.780.000	9.430.000	66 %
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	0	1.000.000	1.000.000	100 %
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	6.000.000	6.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	48.000	48.000	0	0 %

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	120.000	120.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.440.000	720.000	(720.000)	50 %
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	35.245.211.000	35.245.211.000	0	0 %
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	35.245.211.000	35.245.211.000	0	0 %
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	871.500.000	871.500.000	0	0 %
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	871.500.000	871.500.000	0	0 %
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.343.135.000	1.343.135.000	0	0 %
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.343.135.000	1.343.135.000	0	0 %
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	107.505.000	30.780.000	(76.725.000)	71 %
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	107.505.000	30.780.000	(76.725.000)	71 %
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.798.399.600	13.798.400.000	400	0 %
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000	561.540.000	0	0 %
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000	561.540.000	0	0 %
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600	78.615.600	0	0 %
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600	78.615.600	0	0 %
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	86.904.000	86.904.000	0	0 %
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	86.904.000	86.904.000	0	0 %
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000	48.132.000	0	0 %
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000	48.132.000	0	0 %
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000	814.233.000	0	0 %
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000	814.233.000	0	0 %
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	82.580.400	82.580.400	0	0 %
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	82.580.400	82.580.400	0	0 %
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	177.584.000	177.584.400	400	0 %
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	177.584.000	177.584.400	400	0 %

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.180.000.000	3.180.000.000	0	0 %
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.180.000.000	3.180.000.000	0	0 %
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000	787.500.000	0	0 %
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000	787.500.000	0	0 %
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	2.800.000	2.800.000	0	0 %
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	2.800.000	2.800.000	0	0 %
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	70.000	70.000	0	0 %
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	70.000	70.000	0	0 %
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.330.435.600	3.330.435.600	0	0 %
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	55.500.000	55.500.000	0	0 %
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.335.600	3.335.600	0	0 %
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.600.000	3.600.000	0	0 %
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.268.000.000	3.268.000.000	0	0 %
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.608.000.000	4.608.000.000	0	0 %
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.608.000.000	4.608.000.000	0	0 %
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	40.005.000	40.005.000	0	0 %
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	40.005.000	40.005.000	0	0 %
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	636.650.704	603.585.787	(33.064.917)	5 %
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	66.500.000	64.500.000	(2.000.000)	3 %
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	66.500.000	64.500.000	(2.000.000)	3 %
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.800.000	9.800.000	0	0 %
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.800.000	9.800.000	0	0 %
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.000.000	99.000.000	0	0 %
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.000.000	99.000.000	0	0 %
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.500.000	10.500.000	0	0 %
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.500.000	10.500.000	0	0 %

KABUPATEN BANGKA BARAT

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
 JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.000.000	5.000.000	0	0 %
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.000.000	5.000.000	0	0 %
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	200.000	200.000	0	0 %
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	200.000	200.000	0	0 %
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	101.000.000	103.000.000	2.000.000	2 %
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	101.000.000	103.000.000	2.000.000	2 %
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	2.000.000	2.000.000	0	0 %
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	2.000.000	2.000.000	0	0 %
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	2.000.000	2.000.000	0	0 %
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	2.000.000	2.000.000	0	0 %
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	269.088.944	211.607.694	(57.481.250)	21 %
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	899.194	899.194	0	0 %
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	25.168.500	25.168.500	0	0 %
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	595.000	595.000	0	0 %
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	4.250.000	4.250.000	0	0 %
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	153.000.000	127.500.000	(25.500.000)	17 %
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	170.000	170.000	0	0 %
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	2.231.250	2.125.000	(106.250)	5 %
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	6.800.000	6.800.000	0	0 %
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	44.625.000	12.750.000	(31.875.000)	71 %
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan	17.325.000	17.325.000	0	0 %
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	14.025.000	14.025.000	0	0 %
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	71.561.760	95.978.093	24.416.333	34 %
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	33.000.000	49.039.333	16.039.333	49 %
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.000.000	15.772.000	12.772.000	426 %
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.080.000	1.080.000	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 78 Tahun 2023
 Tanggal : 10 Oktober 2023

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1.425.000	1.650.000	225.000	16 %
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	1.800.000	900.000	(900.000)	50 %
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	900.000	2.070.000	1.170.000	130 %
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.340.000	2.655.000	315.000	13 %
5.1.01.05.11.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	500.000	1.000.000	500.000	100 %
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	2.404.260	1.504.260	(900.000)	37 %
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	17.100.000	10.800.000	(6.300.000)	37 %
5.1.01.05.11.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	900.000	450.000	(450.000)	50 %
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.150.000	5.220.000	2.070.000	66 %
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	0	250.000	250.000	100 %
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	3.125.000	3.125.000	0	0 %
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	25.000	25.000	0	0 %
5.1.01.05.11.0028	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	62.500	62.500	0	0 %
5.1.01.05.11.0030	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	750.000	375.000	(375.000)	50 %
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.400	601.600.000	(400)	0 %
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.400	201.600.000	(400)	0 %
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.400	201.600.000	(400)	0 %
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000	400.000.000	0	0 %
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000	400.000.000	0	0 %
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	4.924.443.500	5.717.040.000	792.596.500	16 %
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	4.924.443.500	5.717.040.000	792.596.500	16 %
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	4.924.443.500	5.717.040.000	792.596.500	16 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.135.959.851	383.770.121.520	50.634.161.669	15 %
5.1.02.01	Belanja Barang	51.686.156.036	61.788.115.147	10.101.959.111	20 %
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.618.195.036	61.694.154.147	10.075.959.111	20 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 78 Tahun 2023
Tanggal : 10 Oktober 2023

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	227.495.000	344.266.638	116.771.638	51 %
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	857.199.956	782.458.057	(74.741.899)	9 %
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.264.091.400	4.750.860.900	1.486.769.500	46 %
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.818.000	4.318.000	500.000	13 %
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.250.000	5.650.000	(600.000)	10 %
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	202.860.000	231.013.000	28.153.000	14 %
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	6.000.000	6.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.840.586.939	4.492.403.026	651.816.087	17 %
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.208.551.410	1.336.348.560	127.797.150	11 %
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	7.390.000	7.390.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	126.045.060	63.366.500	(62.678.560)	50 %
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	87.359.500	88.763.500	1.404.000	2 %
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.306.478.290	4.477.982.311	171.504.021	4 %
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.620.000	6.620.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.076.877.700	5.588.162.850	511.285.150	10 %
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	263.508.000	243.368.000	(20.140.000)	8 %
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	31.600.000	41.600.000	10.000.000	32 %
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.446.165.232	2.787.766.295	1.341.601.063	93 %
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	376.799.983	571.213.383	194.413.400	52 %
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	36.820.000	96.510.000	59.690.000	162 %
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	471.640.000	3.659.400.000	3.187.760.000	676 %
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	387.445.000	578.120.000	190.675.000	49 %
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.045.619.096	1.053.244.808	7.625.712	1 %
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.287.058.712	2.821.512.121	(3.465.546.591)	55 %
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.524.388.548	2.351.264.438	(173.124.110)	7 %
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.676.776.000	2.862.401.000	185.625.000	7 %

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	50.505.000	731.405.000	680.900.000	1.348 %
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	35.731.000	35.731.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.599.362.267	5.800.066.957	200.704.690	4 %
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.439.300.904	4.749.747.764	1.310.446.860	38 %
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	15.840.000	16.950.000	1.110.000	7 %
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	40.425.000	36.650.000	(3.775.000)	9 %
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	601.920.000	636.140.000	34.220.000	6 %
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	885.880.600	1.370.027.600	484.147.000	55 %
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.469.754.800	5.292.669.800	3.822.915.000	260 %
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	106.809.993	106.809.993	0	0 %
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	15.840.000	15.840.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	82.702.492	86.902.492	4.200.000	5 %
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	199.639.168	451.089.168	251.450.000	126 %
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	66.550.003	66.550.003	0	0 %
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	27.840.000	48.340.000	20.500.000	74 %
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	5.750.000	5.750.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	71.910.000	71.910.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	12.000.000	174.500.000	162.500.000	1.354 %
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	171.589.983	185.350.983	13.761.000	8 %
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	3.640.475.000	2.310.770.000	(1.329.705.000)	37 %
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	295.625.000	238.950.000	(56.675.000)	19 %
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	7.300.000	10.000.000	2.700.000	37 %
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	67.961.000	93.961.000	26.000.000	38 %
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	0	26.000.000	26.000.000	100 %
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	20.000.000	20.000.000	0	0 %
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	21.151.000	21.151.000	0	0 %

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	26.810.000	26.810.000	0	0 %
5.1.02.02	Belanja Jasa	180.901.378.094	196.322.032.808	15.420.654.714	9 %
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	125.502.718.610	142.599.500.989	17.096.782.379	14 %
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.307.240.000	4.837.090.000	529.850.000	12 %
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.789.901.000	4.702.311.000	912.410.000	24 %
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	128.200.000	133.200.000	5.000.000	4 %
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	424.100.000	364.900.000	(59.200.000)	14 %
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengeloa Teknologi Informasi dan Pengelola Website	12.000.000	0	(12.000.000)	100 %
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	9.400.000	9.400.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	552.600.000	368.400.000	(184.200.000)	33 %
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	26.728.400.000	35.081.100.000	8.352.700.000	31 %
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	13.679.550.000	14.676.001.379	996.451.379	7 %
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	5.800.000	5.800.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.829.180.000	3.829.180.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	525.740.000	525.740.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	909.900.000	909.900.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	698.800.000	682.600.000	(16.200.000)	2 %
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	680.140.000	689.510.000	9.370.000	1 %
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	453.520.000	644.920.000	191.400.000	42 %
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.545.815.600	23.767.946.600	222.131.000	1 %
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	14.864.040.000	16.966.780.000	2.102.740.000	14 %
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.597.420.000	2.379.500.000	782.080.000	49 %
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	11.153.539.000	11.381.809.000	228.270.000	2 %
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.894.900.000	2.895.015.000	115.000	0 %
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.931.890.000	2.881.975.000	(49.915.000)	2 %
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	98.500.000	978.000.000	879.500.000	893 %

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	9.340.000	54.890.000	45.550.000	488%
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	196.900.000	185.800.000	(11.100.000)	6 %
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	320.780.000	316.340.000	(4.440.000)	1 %
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	933.765.900	1.983.765.900	1.050.000.000	112 %
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	89.450.000	250.256.000	160.806.000	180%
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	18.250.000	22.250.000	4.000.000	22 %
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	291.895.100	182.153.800	(109.741.300)	38%
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	290.022.900	274.783.500	(15.239.400)	5 %
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	68.240.500	68.240.500	0	0 %
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	799.650.000	1.062.150.000	262.500.000	33 %
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	389.172.000	371.716.000	(17.456.000)	4 %
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	299.541.960	385.716.960	86.175.000	29 %
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.173.736.000	4.602.694.000	428.958.000	10 %
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	244.169.000	234.564.000	(9.605.000)	4 %
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.069.008.000	3.170.895.200	101.887.200	3 %
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	93.315.000	84.665.000	(8.650.000)	9 %
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	17.000.000	29.520.000	12.520.000	74 %
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	283.824.650	518.540.150	234.715.500	83%
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	1.582.000	1.582.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	17.800.000	17.800.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	74.700.000	70.100.000	(4.600.000)	6 %
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	36.884.240.900	35.311.029.700	(1.573.211.200)	4 %
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	937.590.500	937.590.500	0	0 %
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	35.158.082.400	32.067.252.000	(3.090.830.400)	9 %
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	638.568.000	624.052.800	(14.515.200)	2 %
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	150.000.000	342.534.400	192.534.400	128 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 78 Tahun 2023
 Tanggal : 10 Oktober 2023

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0	20.400.000	20.400.000	100 %
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	0	1.319.200.000	1.319.200.000	100 %
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	127.200.000	95.550.000	(31.650.000)	25 %
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	127.200.000	71.550.000	(55.650.000)	44 %
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	0	24.000.000	24.000.000	100 %
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.285.566.225	6.249.320.260	(1.036.245.965)	14 %
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	41.900.000	92.620.285	50.720.285	121 %
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	0	21.200.000	21.200.000	100 %
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.155.595.000	1.884.800.000	(1.270.795.000)	40 %
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	55.500.000	58.500.000	3.000.000	5 %
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	140.000.000	0	(140.000.000)	100 %
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	20.500.000	50.000.000	29.500.000	144 %
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	8.000.000	4.000.000	(4.000.000)	50 %
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	4.800.000	4.800.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.375.987.500	1.701.486.000	(674.501.500)	28 %
5.1.02.02.04.0122	Belanja Sewa Alat Dapur	4.240.000	4.240.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tingga Lainnya (Home Use)	914.693.725	1.303.189.975	388.496.250	42 %
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	320.350.000	330.850.000	10.500.000	3 %
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	4.000.000	4.000.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	80.000.000	0	(80.000.000)	100 %
5.1.02.02.04.0301	Belanja Sewa Unit Alat Laboratorium Lainnya	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0504	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Atletik	150.000.000	0	(150.000.000)	100 %
5.1.02.02.04.0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	0	779.634.000	779.634.000	100 %
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.744.615.000	2.529.620.600	(214.994.400)	8 %
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	89.000.000	109.000.000	20.000.000	22 %
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	323.570.000	369.570.000	46.000.000	14 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 78 Tahun 2023
 Tanggal : 10 Oktober 2023

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	850.000.000	7.090.000	(842.910.000)	99 %
5.1.02.02.05.0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	136.169.000	136.169.000	0	0 %
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	50.000.000	0	(50.000.000)	100 %
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	350.000.000	30.000.000	(320.000.000)	91 %
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	871.876.000	1.796.291.600	924.415.600	106 %
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	74.000.000	81.500.000	7.500.000	10 %
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	260.400.000	1.000.000	(259.400.000)	100 %
5.1.02.02.06.0103	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0	1.000.000	1.000.000	100 %
5.1.02.02.06.0125	Belanja Sewa Jaringan Distribusi	260.400.000	0	(260.400.000)	100 %
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0	233.604.000	233.604.000	100 %
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	0	203.104.000	203.104.000	100 %
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	0	24.500.000	24.500.000	100 %
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	0	6.000.000	6.000.000	100 %
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.484.861.553	3.882.548.803	1.397.687.250	56 %
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	104.907.078	214.907.078	110.000.000	105 %
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	178.200.000	400.000.000	221.800.000	124 %
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0	30.730.350	30.730.350	100 %
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	88.000.000	350.326.500	262.326.500	298 %
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	118.950.000	400.910.000	281.960.000	237 %
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	150.000.000	150.000.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	1.033.750.000	734.340.000	(299.410.000)	29 %
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	290.735.635	290.735.635	0	0 %
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	39.970.000	223.680.400	183.710.400	460 %
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	75.268.840	84.768.840	9.500.000	13 %
5.1.02.02.08.0031	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal	125.680.000	504.430.000	378.750.000	301 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 78 Tahun 2023
 Tanggal : 10 Oktober 2023

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0	150.000.000	150.000.000	100%
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	264.400.000	332.720.000	68.320.000	26%
5.1.02.02.08.0036	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	15.000.000	15.000.000	0	0%
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.770.181.000	2.561.609.000	(208.572.000)	8%
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	26.000.000	0	(26.000.000)	100%
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	620.000.000	75.000.000	(545.000.000)	88%
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0	96.000.000	96.000.000	100%
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	874.181.000	879.609.000	5.428.000	1%
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.250.000.000	1.311.000.000	61.000.000	5%
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	0	200.000.000	200.000.000	100%
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	18.000.000	56.000.000	38.000.000	211%
5.1.02.02.10.0003	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	18.000.000	18.000.000	0	0%
5.1.02.02.10.0014	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian	0	38.000.000	38.000.000	100%
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	120.000.000	0	(120.000.000)	100%
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	120.000.000	0	(120.000.000)	100%
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.100.523.000	2.286.049.400	185.526.400	9%
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	346.369.000	551.964.400	205.595.400	59%
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	37.750.000	37.750.000	0	0%
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	790.500.000	1.047.500.000	257.000.000	33%
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	925.904.000	648.835.000	(277.069.000)	30%
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	559.121.806	485.967.556	(73.154.250)	13%
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1.216.556	1.216.556	0	0%
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	34.051.500	34.051.500	0	0%
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	805.000	805.000	0	0%
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	5.750.000	5.750.000	0	0%

Lampiran I : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 78 Tahun 2023
Tanggal : 10 Oktober 2023

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENOAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	207.000.000	172.500.000	(34.500.000)	17 %
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	230.000	230.000	0	0 %
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.018.750	2.875.000	(143.750)	5 %
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	7.200.000	9.200.000	2.000.000	28 %
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	60.375.000	17.250.000	(43.125.000)	71 %
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	220.500.000	223.114.500	2.614.500	1 %
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	18.975.000	18.975.000	0	0 %
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	43.950.000	30.232.500	(13.717.500)	31 %
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.940.000	1.940.000	0	0 %
5.1.02.02.14.0004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000	1.500.000	0	0 %
5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1.293.750	825.000	(468.750)	36 %
5.1.02.02.14.0006	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	2.500.000	1.250.000	(1.250.000)	50 %
5.1.02.02.14.0011	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tiera/Tiera Ulang	1.725.000	1.897.500	172.500	10 %
5.1.02.02.14.0015	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.622.500	1.856.250	(1.766.250)	49 %
5.1.02.02.14.0017	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	3.339.250	2.089.250	(1.250.000)	37 %
5.1.02.02.14.0018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	23.750.000	15.000.000	(8.750.000)	37 %
5.1.02.02.14.0025	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	3.375.000	3.375.000	0	0 %
5.1.02.02.14.0027	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	27.000	27.000	0	0 %
5.1.02.02.14.0028	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	67.500	67.500	0	0 %
5.1.02.02.14.0030	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	810.000	405.000	(405.000)	50 %
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	11.491.201.427	16.915.083.922	5.423.882.495	47 %
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	20.000.000	393.400.000	373.400.000	1.867 %
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	0	100.000.000	100.000.000	100 %
5.1.02.03.01.0018	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir	5.000.000	272.500.000	267.500.000	5.350 %
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	15.000.000	20.900.000	5.900.000	39 %

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.894.172.700	2.123.091.988	228.919.288	12 %
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	0	35.000.000	35.000.000	100 %
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	133.970.000	133.970.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	5.000.000	5.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.400.000	1.400.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	27.060.000	26.800.000	(260.000)	1 %
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	172.107.000	139.454.000	(32.653.000)	19 %
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.000.000	3.400.000	(1.600.000)	32 %
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	951.000	600.000	(351.000)	37 %
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	139.000.000	139.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	294.290.100	312.929.170	18.639.070	6 %
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	14.420.000	14.420.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	90.000.000	90.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	328.778.000	339.438.000	10.660.000	3 %
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	28.000.000	62.999.993	34.999.993	125 %
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	4.500.000	13.595.000	9.095.000	202 %
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	254.486.500	307.071.500	52.585.000	21 %
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	105.580.550	145.184.550	39.604.000	38 %
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.250.000	1.250.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0	15.000.000	15.000.000	100 %
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	20.000.000	5.000.000	(15.000.000)	75 %
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	3.000.000	0	(3.000.000)	100 %
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	55.200.000	81.950.000	26.750.000	48 %
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	21.000.000	35.500.000	14.500.000	69 %
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	24.340.000	54.340.000	30.000.000	123 %
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	64.739.550	59.689.775	(5.049.775)	8 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 78 Tahun 2023
Tanggal : 10Oktober 2023

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	100.100.000	100.100.000	0	0 %
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.386.740.666	8.639.242.351	4.252.501.685	97 %
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	861.999.999	1.854.059.999	992.060.000	115 %
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	107.560.667	236.182.352	128.621.685	120 %
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	80.000.000	145.000.000	65.000.000	81 %
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0	2.650.000.000	2.650.000.000	100 %
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	2.997.180.000	3.290.000.000	292.820.000	10 %
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	0	29.000.000	29.000.000	100 %
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	18.000.000	96.000.000	78.000.000	433 %
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	7.000.000	4.000.000	(3.000.000)	43 %
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	90.000.000	90.000.000	0	0 %
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	220.000.000	240.000.000	20.000.000	9 %
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	5.000.000	5.000.000	0	0 %
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.166.970.061	5.736.031.583	569.061.522	11 %
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
5.1.02.03.04.0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	0	20.000.000	20.000.000	100 %
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	3.000.000	103.000.000	100.000.000	3.333 %
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	140.920.000	140.920.000	0	0 %
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	57.000.000	252.511.900	195.511.900	343 %
5.1.02.03.04.0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1.583.800.000	1.815.434.500	231.634.500	15 %
5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	23.000.000	9.500.000	(13.500.000)	59 %
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	23.000.061	15.390.183	(7.609.878)	33 %
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	15.500.000	6.500.000	(9.000.000)	58 %
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	320.750.000	372.775.000	52.025.000	16 %
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	23.318.000	23.318.000	0	0 %
5.1.02.03.05.0001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	23.318.000	23.318.000	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 78 Tahun 2023
Tanggal : 10 Oktober 2023

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	47.154.517.782	53.552.025.894	6.397.508.112	14 %
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.154.517.782	53.552.025.894	6.397.508.112	14 %
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.751.327.862	39.197.990.974	5.446.663.112	16 %
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.297.883.000	13.557.424.000	1.259.541.000	10 %
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	674.383.320	704.888.320	30.505.000	5 %
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	430.923.600	91.722.600	(339.201.000)	79 %
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.030.685.301	13.104.676.266	6.073.990.965	86 %
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.665.008.800	8.415.983.800	4.750.975.000	130 %
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	614.804.200	1.850.329.200	1.235.525.000	201 %
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	3.050.204.600	6.565.654.600	3.515.450.000	115 %
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.365.676.501	4.688.692.466	1.323.015.965	39 %
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.308.146.701	3.068.732.666	760.585.965	33 %
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.057.529.800	1.619.959.800	562.430.000	53 %
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	19.678.076.211	18.473.385.833	(1.204.690.378)	6 %
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	19.678.076.211	18.473.385.833	(1.204.690.378)	6 %
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	19.678.076.211	18.473.385.833	(1.204.690.378)	6 %
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.193.945.000	23.614.801.650	8.420.856.650	55 %
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.193.945.000	23.614.801.650	8.420.856.650	55 %
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.193.945.000	23.614.801.650	8.420.856.650	55 %
5.1.05	Belanja Hibah	30.722.321.478	45.583.453.369	14.861.131.891	48 %
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0	642.964.000	642.964.000	100 %
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0	642.964.000	642.964.000	100 %
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0	642.964.000	642.964.000	100 %
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0	7.358.074.000	7.358.074.000	100 %
5.1.05.02.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0	7.358.074.000	7.358.074.000	100 %
5.1.05.02.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0	7.358.074.000	7.358.074.000	100 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 78 Tahun 2023
 Tanggal : 10 Oktober 2023

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	26.845.275.828	32.854.987.028	6.009.711.200	22 %
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.355.180.000	13.866.331.200	11.511.151.200	489 %
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.353.080.000	13.116.231.200	10.763.151.200	457 %
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.100.000	750.100.000	748.000.000	35.619 %
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	715.421.178	709.921.178	(5.500.000)	1 %
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	200.000.000	200.000.000	0	0 %
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	515.421.178	509.921.178	(5.500.000)	1 %
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	14.624.674.650	9.128.734.650	(5.495.940.000)	38 %
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.523.654.650	3.423.654.650	(5.100.000.000)	60 %
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.075.000.000	1.275.000.000	200.000.000	19 %
5.1.05.05.03.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.026.020.000	4.430.080.000	(595.940.000)	12 %
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	9.150.000.000	9.150.000.000	0	0 %
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	9.150.000.000	9.150.000.000	0	0 %
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	2.432.260.650	3.282.643.341	850.382.691	35 %
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	139.100.000	0	(139.100.000)	100 %
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	139.100.000	0	(139.100.000)	100 %
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.272.517.250	3.282.643.341	1.010.126.091	44 %
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.272.517.250	3.282.643.341	1.010.126.091	44 %
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdus Swasta	20.643.400	0	(20.643.400)	100 %
5.1.05.06.04.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdus Swasta	20.643.400	0	(20.643.400)	100 %
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.444.785.000	1.444.785.000	0	0 %
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.444.785.000	1.444.785.000	0	0 %
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.444.785.000	1.444.785.000	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 78 Tahun 2023
 Tanggal : 10 Oktober 2023

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.371.842.000	3.977.430.000	(394.412.000)	9 %
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.075.392.000	3.777.230.000	(298.162.000)	7 %
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.262.000.000	3.232.850.000	970.850.000	43 %
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.262.000.000	3.232.850.000	970.850.000	43 %
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.813.392.000	544.380.000	(1.269.012.000)	70 %
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.813.392.000	544.380.000	(1.269.012.000)	70 %
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	200.200.000	200.200.000	0	0 %
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	200.200.000	200.200.000	0	0 %
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	200.200.000	200.200.000	0	0 %
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	96.250.000	0	(96.250.000)	100 %
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	96.250.000	0	(96.250.000)	100 %
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	96.250.000	0	(96.250.000)	100 %
5.2	BELANJA MODAL	160.546.735.909	182.196.360.162	21.649.624.253	13 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.700.000.000	2.700.000.000	0	0 %
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.700.000.000	2.700.000.000	0	0 %
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	2.700.000.000	2.700.000.000	0	0 %
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	2.700.000.000	2.700.000.000	0	0 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.271.815.039	33.368.447.316	6.096.632.277	22 %
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0	270.400.001	270.400.001	100 %
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0	270.400.001	270.400.001	100 %
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	0	200.000.000	200.000.000	100 %
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	0	10.220.001	10.220.001	100 %
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0	60.180.000	60.180.000	100 %
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.864.933.000	1.864.933.000	0	0 %
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.864.933.000	1.864.933.000	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 78 Tahun 2023
 Tanggal : 10 Oktober 2023

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	264.933.000	264.933.000	0	0 %
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.600.000.000	1.600.000.000	0	0 %
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	49.017.500	49.017.500	0	0 %
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	49.017.500	49.017.500	0	0 %
5.2.02.03.03.0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	49.017.500	49.017.500	0	0 %
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.216.893.600	4.514.258.638	3.297.365.038	271 %
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	571.339.000	1.991.479.000	1.420.140.000	249 %
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	103.514.000	96.244.000	(7.270.000)	7 %
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	467.825.000	1.895.235.000	1.427.410.000	305 %
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	500.757.900	2.387.161.438	1.886.403.538	377 %
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	136.040.000	427.588.080	291.548.080	214 %
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	560.000	0	(560.000)	100 %
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	185.750.000	539.796.250	354.046.250	191 %
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0	96.618.500	96.618.500	100 %
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	170.007.900	1.314.758.608	1.144.750.708	673 %
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	8.400.000	8.400.000	0	0 %
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	144.796.700	135.618.200	(9.178.500)	6 %
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	72.400.000	63.400.000	(9.000.000)	12 %
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	14.578.500	14.400.000	(178.500)	1 %
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	57.818.200	57.818.200	0	0 %
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	67.850.400	571.680.400	503.830.000	743 %
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	67.850.400	387.780.400	319.930.000	472 %
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	41.000.000	121.000.000	80.000.000	195 %
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	25.650.400	170.650.400	145.000.000	565 %
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0	69.930.000	69.930.000	100 %
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0	25.000.000	25.000.000	100 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 78 Tahun 2023
Tanggal : 10Oktober 2023

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.200.000	1.200.000	0	0 %
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0	49.200.000	49.200.000	100 %
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0	31.700.000	31.700.000	100 %
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0	17.500.000	17.500.000	100 %
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	0	134.700.000	134.700.000	100 %
5.2.02.06.04.0006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	0	134.700.000	134.700.000	100 %
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	12.509.586.910	12.272.872.910	(236.714.000)	2 %
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	12.468.872.910	12.238.522.910	(230.350.000)	2 %
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	12.468.872.910	12.238.522.910	(230.350.000)	2 %
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	40.714.000	34.350.000	(6.364.000)	16 %
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	40.714.000	34.350.000	(6.364.000)	16 %
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.685.480.000	3.310.991.054	1.625.511.054	96 %
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.672.980.000	2.716.969.994	1.043.989.994	62 %
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	298.780.000	966.779.994	667.999.994	224 %
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.374.200.000	1.750.190.000	375.990.000	27 %
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.500.000	594.021.060	581.521.060	4.652 %
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0	169.000.000	169.000.000	100 %
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	12.500.000	425.021.060	412.521.060	3.300 %
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0	10.000.000	10.000.000	100 %
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0	10.000.000	10.000.000	100 %
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	0	10.000.000	10.000.000	100 %
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	271.696.090	696.246.090	424.550.000	156 %
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	271.696.090	696.246.090	424.550.000	156 %

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	271.696.090	686.246.090	414.550.000	153 %
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	0	10.000.000	10.000.000	100 %
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0	672.000.000	672.000.000	100 %
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0	672.000.000	672.000.000	100 %
5.2.02.14.01.0002	Belanja Modal Elektrik	0	672.000.000	672.000.000	100 %
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0	7.800.000	7.800.000	100 %
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0	4.800.000	4.800.000	100 %
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0	4.800.000	4.800.000	100 %
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	0	3.000.000	3.000.000	100 %
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	0	3.000.000	3.000.000	100 %
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	10.000.000	63.100.000	53.100.000	531 %
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10.000.000	63.100.000	53.100.000	531 %
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	10.000.000	63.100.000	53.100.000	531 %
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	1.485.620.000	1.485.620.000	0	0 %
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	1.485.620.000	1.485.620.000	0	0 %
5.2.02.17.01.0026	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	1.485.620.000	1.485.620.000	0	0 %
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	2.672.500.000	4.208.600.500	1.536.100.500	57 %
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	2.672.500.000	4.208.600.500	1.536.100.500	57 %
5.2.02.19.01.0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	0	628.000.000	628.000.000	100 %
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	2.672.500.000	3.580.600.500	908.100.500	34 %
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.428.237.539	3.360.927.223	(2.067.310.316)	38 %
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.428.237.539	3.360.927.223	(2.067.310.316)	38 %
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.428.237.539	3.360.927.223	(2.067.310.316)	38 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.744.680.000	68.572.341.000	15.827.661.000	30 %
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	51.834.590.000	67.431.539.000	15.596.949.000	30 %
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	51.834.590.000	66.771.133.000	14.936.543.000	29 %

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	100.000.000	958.706.000	858.706.000	859 %
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	3.407.310.000	3.407.310.000	0	0 %
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	5.612.530.000	3.995.745.000	(1.616.785.000)	29 %
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.296.745.000	15.043.255.000	1.746.510.000	13 %
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	21.734.250.000	34.526.302.000	12.792.052.000	59 %
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0	414.060.000	414.060.000	100 %
5.2.03.01.01.0028	Belanja Modal Bangunan Industri	6.394.005.000	6.394.005.000	0	0 %
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	642.000.000	642.000.000	100 %
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	227.000.000	277.000.000	50.000.000	22 %
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	463.500.000	513.500.000	50.000.000	11 %
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	599.250.000	599.250.000	0	0 %
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	660.406.000	660.406.000	100 %
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0	660.406.000	660.406.000	100 %
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	910.090.000	1.140.802.000	230.712.000	25 %
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	910.090.000	1.140.802.000	230.712.000	25 %
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	910.090.000	1.140.802.000	230.712.000	25 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.072.490.370	73.018.630.372	(3.053.859.998)	4 %
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	73.095.961.370	69.352.501.370	(3.743.460.000)	5 %
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	73.035.456.370	69.291.996.370	(3.743.460.000)	5 %
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	65.581.968.800	57.099.768.800	(8.482.200.000)	13 %
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	3.791.780.570	3.943.210.570	151.430.000	4 %
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	3.661.707.000	8.249.017.000	4.587.310.000	125 %
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	60.505.000	60.505.000	0	0 %
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	60.505.000	60.505.000	0	0 %
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	85.000.000	85.000.000	0	0 %
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	85.000.000	85.000.000	0	0 %

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	85.000.000	85.000.000	0	0 %
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.774.779.000	2.460.279.002	685.500.002	39 %
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0	515.500.002	515.500.002	100%
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0	515.500.002	515.500.002	100%
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	1.774.779.000	1.774.779.000	0	0 %
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.774.779.000	1.774.779.000	0	0 %
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0	170.000.000	170.000.000	100 %
5.2.04.03.06.0003	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik	0	170.000.000	170.000.000	100%
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.116.750.000	1.120.850.000	4.100.000	0 %
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.116.750.000	1.120.850.000	4.100.000	0 %
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.116.750.000	1.120.850.000	4.100.000	0 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.727.750.500	4.536.941.474	2.809.190.974	163 %
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	243.828.400	253.828.400	10.000.000	4 %
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	243.828.400	253.828.400	10.000.000	4 %
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	242.440.000	252.440.000	10.000.000	4 %
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.388.400	1.388.400	0	0 %
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0	1.239.304.000	1.239.304.000	100%
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0	1.239.304.000	1.239.304.000	100%
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0	1.239.304.000	1.239.304.000	100%
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.483.922.100	3.043.809.074	1.559.886.974	105 %
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.483.922.100	3.043.809.074	1.559.886.974	105 %
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.483.922.100	3.043.809.074	1.559.886.974	105 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	30.000.000	0	(30.000.000)	100 %
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	30.000.000	0	(30.000.000)	100%
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	30.000.000	0	(30.000.000)	100 %
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	30.000.000	0	(30.000.000)	100 %

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.105.000.000	3.250.000.000	(855.000.000)	21 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.105.000.000	3.250.000.000	(855.000.000)	21 %
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.105.000.000	3.250.000.000	(855.000.000)	21 %
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.105.000.000	3.250.000.000	(855.000.000)	21 %
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	4.105.000.000	3.250.000.000	(855.000.000)	21 %
5.4	BELANJA TRANSFER	112.216.368.150	117.647.142.150	5.430.774.000	5 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.686.592.750	3.728.428.750	41.836.000	1 %
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.915.678.750	2.915.678.750	0	0 %
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.915.678.750	2.915.678.750	0	0 %
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.915.678.750	2.915.678.750	0	0 %
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	770.914.000	812.750.000	41.836.000	5 %
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	770.914.000	812.750.000	41.836.000	5 %
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	770.914.000	812.750.000	41.836.000	5 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	108.529.775.400	113.918.713.400	5.388.938.000	5 %
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	108.529.775.400	113.918.713.400	5.388.938.000	5 %
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	106.539.775.400	111.928.713.400	5.388.938.000	5 %
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	106.539.775.400	111.928.713.400	5.388.938.000	5 %
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.990.000.000	1.990.000.000	0	0 %
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.990.000.000	1.990.000.000	0	0 %
	Jumlah Belanja	1.022.156.851.932	1.105.735.942.112	83.579.090.180	8 %
	Total Surplus/(Defisit)	(132.006.506.432)	(107.291.801.771)	24.714.704.661	-19 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	132.006.506.432	107.291.801.771	(24.714.704.661)	19 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	131.906.506.432	107.191.801.771	(24.714.704.661)	19 %
6.1.01.05	Penghematan Belanja	131.906.506.432	107.191.801.771	(24.714.704.661)	19 %

Pusat Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Ka. OPD	
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD	
Kabid.	

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	131.906.506.432	107.191.801.771	(24.714.704.661)	19 %
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	35.000.000.000	35.000.000.000	0	0 %
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	29.301.08.552	11.573.905.173	8.643.796.621	295 %
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	91.376.397.880	58.017.896.598	(33.358.501.282)	37 %
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	2.600.000.000	2.600.000.000	0	0 %
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000	100.000.000	0	0 %
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	100.000.000	100.000.000	0	0 %
6.1.05.06.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	100.000.000	100.000.000	0	0 %
6.1.05.06.01.0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	100.000.000	100.000.000	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	132.006.506.432	107.291.801.771	(24.714.704.661)	19 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0	0	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0	0	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0	0	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0 %
	Pembiayaan Netto	132.006.506.432	107.291.801.771	(24.714.704.661)	19 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	(0)	(0)	0	0 %

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Ka. OPD	BPRAD
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD	
Kabid.	
Chupand PU	

Bupati Bangka Barat



SUKIRMAN